



---

## **KEBIJAKAN ENERGI INDONESIA: STRATEGI BILATERAL DI AKHIR ERA KEPRESIDENAN JOKO WIDODO**

Aurelya Arwen Nugroho<sup>1</sup>, Arief Tri Bintang Nugroho<sup>2</sup>,  
Patrick Daniel Herpuji Wungkana<sup>3</sup>, Emir Clement Jamal<sup>4</sup>

### **Abstrak:**

**P**enelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan energi yang diterapkan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut dalam menghadapi tantangan domestik dan internasional, serta mengidentifikasi peluang kerjasama bilateral guna meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Upaya signifikan dilakukan selama kepemimpinan Joko Widodo untuk mereformasi sektor energi, khususnya melalui pengurangan subsidi bahan bakar dan promosi energi terbarukan. Inisiatif utama termasuk implementasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menekankan diversifikasi energi dan peningkatan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Strategi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang besar. Di tingkat internasional, Indonesia telah menjalin kemitraan strategis dengan negara berkembang dan maju untuk memperkuat pengelolaan dan infrastruktur energi. Kolaborasi bilateral yang sukses, seperti dengan Jepang dan Denmark, menyoroti efektivitas pendekatan bilateral dibandingkan dengan multilateral yang sering menghadapi kendala implementasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi bilateral lebih strategis dan efektif dalam meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Kebijakan energi masa depan harus terus mengedepankan kerjasama bilateral yang konkret dan berfokus pada energi terbarukan, sambil mempertimbangkan peluang kerjasama multilateral yang berpotensi.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Joko Widodo, Energi, Bilateral.

**Abstract:**

**T**his research aims to analyze the energy policies implemented during President Joko Widodo's administration, evaluate their effectiveness and efficiency in addressing domestic and international challenges, and identify bilateral cooperation opportunities to enhance Indonesia's energy security. Significant efforts were made during Joko Widodo's presidency to reform the energy sector, particularly through the reduction of fuel subsidies and the promotion of renewable energy. Key initiatives include the implementation of the National Energy Policy (KEN) and the General Plan of National Energy (RUEN), emphasizing energy diversification and increasing the contribution of renewable energy in the national energy mix. These strategies demonstrate Indonesia's commitment to reducing dependence on fossil fuels and optimizing its substantial renewable energy potential. Internationally, Indonesia has engaged in strategic partnerships, both with developing and developed countries, to strengthen energy management and infrastructure. Successful bilateral collaborations, such as those with Japan and Denmark, highlight the effectiveness of bilateral approaches over multilateral ones, which often face implementation challenges. The study concludes that bilateral strategies are more strategic and effective for enhancing Indonesia's energy security. Future energy policies should continue to prioritize concrete bilateral cooperation focused on renewable energy while considering potential multilateral cooperation opportunities.

**Keywords :** Policy, Joko Widodo, Energy, Bilateral.

## **Pendahuluan**

**P**engelolaan energi oleh negara menjadi penting dilakukan, pasalnya negara yang di dalamnya terdapat masyarakat perlu menggunakan energi sebagai penunjang aktivitas kehidupan maupun pekerjaan. Energi pada umumnya menjadi kemaslahatan terpenting bagi negara karena merupakan kunci pertumbuhan ekonomi dimana perihal produksi serta konsumsi pasti melibatkan pengelolaan energi (Asghar, 2008), sehingga apabila sektor energi tertinggal atau tidak terurus sama sekali maka bisa menjadi permasalahan dengan tingkat urgensi yang tinggi. Fenomena tersebut bisa terjadi di mana saja termasuk Indonesia, dimana diperkirakan dalam tempo 60 tahun lagi Indonesia akan kehabisan energi tidak terbarukan yang meliputi minyak bumi, gas bumi dan batu bara (Ahdiat, 2023) namun dalam sektor energi terbarukan sendiri Indonesia mempunyai jumlah yang sangat besar yaitu sekitar 3.686 GigaWatt dimana sekitar 12,54 GigaWatt saja yang baru dimanfaatkan (Pribadi, 2023). Sejarah pengelolaan energi di Indonesia pada mulanya telah berjalan pada masa sebelum kemerdekaan atau masa Hindia Belanda dimana dibentuk badan yang mengurus mengenai pertambangan lalu seiring dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, semangat untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri menguat puncaknya pada tanggal 28 September 1945, para pemuda Indonesia mengambil alih kantor Chisitsu Chosasho (era Jepang) dan mengubah namanya menjadi Poesat Djawatan Tambang dan Geologi yang nantinya berubah menjadi Kementerian ESDM (ESDM, 2008).

Dengan bukti sejarah perjalanan pengelolaan energi yang panjang oleh Indonesia, bukan berarti tidak terdapat adanya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sendiri, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak lagi berasal dari sektor domestik tapi juga berasal dari isu global dimana negara-negara yang ada di dunia bisa saling mempengaruhi satu sama lain dan berpengaruh

terhadap kebijakan suatu negara, misalnya saja Indonesia saat ini yang masih mengimpor bahan bakar minyak dari beberapa negara (Taufani, 2024) juga bagaimana perang yang terjadi belakangan seperti perang Rusia-Ukraina menjadi suatu permasalahan energi global termasuk Indonesia yang membuat harga kebutuhan energi menjadi lebih tinggi dari sebelumnya (Shofiyana et al., 2022), munculnya isu perubahan iklim juga menjadi suatu persoalan global yang kritis pada saat ini terutama bagi Indonesia yang seperti telah dibahas sebelumnya bahwa kurang lebih 60 tahun lagi energi tidak terbarukan Indonesia telah habis, sehingga jika Indonesia tidak siap dalam merumuskan kebijakan energi dalam rentang waktu tersebut maka potensi akan munculnya ketidaktahanan energi menjadi sangat besar ditambah dengan tidak begitu banyaknya energi berkualitas tinggi di Indonesia (Rahman et al., 2021). Hal ini juga belum termasuk permasalahan global lain yang masih belum terjadi di masa depan, dimana situasi global yang terus berjalan menyebabkan permasalahan global tidak bisa ditebak dan menjadi dinamis, sehingga perumusan kebijakan mengenai energi sangat perlu dikaji lebih lanjut.

Dengan adanya temuan tersebut maka pada penelitian ini peneliti mengusulkan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bisa berbuat banyak dalam strategi perumusan kebijakan energi dengan adanya isu-isu global yang terjadi di dunia, selanjutnya akan dikaji juga tentang bagaimana Presiden Indonesia saat ini yaitu Joko Widodo mengatasi permasalahan energi domestik dan bisa berbicara atau berkehendak kepada dunia internasional terutama sektor bilateral mengenai permasalahan energi yang dialami Indonesia dan strategi kebijakan luar negeri apa yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mendapatkan analisis tentang kebijakan energi yang dilakukan semasa pemerintahan Joko Widodo sehingga nantinya bisa di dapat

efektivitas dan efisiensi yang terjadi dari kebijakan energi yang diterapkan selanjutnya adalah bisa teridentifikasi nya peluang-peluang kerjasama bilateral untuk meningkatkan potensi ketahanan energi bagi Indonesia. Nantinya Setelah didapatkan mengenai hasil penelitian di akhir terdapat bagian kesimpulan yang akan dijadikan sarana kritik dan masukan yang didapatkan dari hasil pembahasan yang dilakukan.

### **Kerangka Teori**

Dalam proses pembuatan artikel ini, para penulis akan menerapkan atau menitikberatkan dua konsep teori sebagai kerangka pemikiran yang digunakan; Neoliberal Institutionalism dan Teori Diplomasi dalam bidang energi. Pada dasarnya, Neoliberal Institutionalism menekankan pentingnya kerjasama internasional melalui institusi dan rezim internasional (Shu, 2023). Negara-negara saling bergantung dan dapat mencapai tujuan bersama melalui koordinasi dan kerjasama multilateral. Dalam hal ini, maksud penggunaan dari teori ini adalah dapat membantu untuk memahami bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama internasional dan institusi global untuk memperkuat kebijakan energi nasional, termasuk partisipasi dalam organisasi internasional terkait energi, perjanjian multilateral, dan kerjasama teknologi. Lalu adapun juga penggunaan Teori Diplomasi dalam bidang energi sebagai acuan analisa. Teori diplomasi energi itu sendiri berfokus pada penggunaan sumber daya energi sebagai alat diplomasi untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi (Davytan & Khacikyan, 2022). Hal ini mencakup negosiasi perdagangan energi, aliansi strategis, dan perjanjian bilateral dan multilateral. Para penulis menemukan teori ini relevan untuk membantu dalam menganalisis bagaimana Indonesia dapat menggunakan diplomasi energi untuk memperkuat posisi negosiasinya di

kancah internasional, menjalin kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara lain, dan memastikan bahwa keamanan pasokan energi tetap terjaga.

Para penulis menemukan bahwa dengan penggunaan kedua teori tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai alat pembantu dalam menganalisis kebijakan energi yang diterapkan selama pemerintahan Joko Widodo, terutama dalam sisi efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut ketika menghadapi tantangan domestik dan internasional. Adapun beberapa aspek yang krusial untuk dibahas seperti yang pastinya adalah kebijakan domestik, yakni langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi ketergantungan pada energi tidak terbarukan dan mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang besar di Indonesia. Yang kedua adalah diplomasi energi, yakni strategi yang digunakan untuk memperkuat kerjasama energi dengan negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, seperti partisipasi dalam organisasi internasional, perjanjian perdagangan energi, dan pembentukan aliansi strategis lainnya. Dan yang terakhir yaitu isu global, dimana para penulis merasa penting untuk diketahui bagaimana respons Indonesia ketika terhadap isu-isu global dan fluktuasi harga energi akibat konflik internasional.

Para penulis merasakan bahwa penerapan Neoliberal Institutionalism dan Teori Diplomasi Energi dapat memberikan sebuah pandangan yang mendalam serta menyeluruh mengenai efektivitas dan efisiensi kebijakan energi Indonesia. Strategi-strategi yang diterapkan dalam kebijakan domestik dan diplomasi energi selama pemerintahan Joko Widodo dapat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui kerjasama internasional yang strategis. Penulisan penelitian ini juga tidak hanya akan memberikan analisis mendalam tetapi juga sekedar menawarkan sebuah saran untuk kebijakan energi yang lebih baik di masa depan, yang adaptif dan dapat menghadapi tantangan domestik dan global dengan lebih efektif.

## **Metode Penelitian**

Dalam menganalisis bagaimana strategi kerjasama dengan negara lain dapat mempengaruhi sistem kebijakan energi Indonesia pada masa akhir kepemimpinan Joko Widodo, para penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai cara untuk meneliti identifikasi masalah, selanjutnya dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode Document Research. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis dari data-data seperti laporan, jurnal artikel, artikel ilmiah, dan jenis dokumen yang relevan lainnya. Setelah dokumen dan sumber informasi yang dibutuhkan telah terkumpul, data tersebut nantinya akan ditinjau lebih dalam menggunakan Teori Neoliberal Institutionalism dan Teori Diplomasi Energi sebagai alat untuk membangun kerangka pemikiran yang akan mendukung analisis data. Agar dapat melihat bagaimana kebijakan tersebut berpengaruh, nantinya akan dilakukan studi kasus terhadap kebijakan energi tertentu yang telah diimplementasikan selama masa kepemimpinan Joko Widodo. Studi kasus tersebut akan melibatkan pembahasan mengenai bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, apa saja tantangan yang dihadapi serta apa saja hasil yang dicapai. Melalui metode penelitian yang para penulis lakukan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai kebijakan energi Indonesia selama era kepemimpinan Joko Widodo, serta dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan energi di masa depan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dalam mengelola sumber daya energi untuk mencapai hasil yang berkelanjutan, sistem kebijakan energi di Indonesia terus berubah dari masa ke masa. Berawal dari eksplorasi minyak bumi oleh Belanda dan pengambilalihan perusahaan energi setelah Indonesia merdeka, kebijakan energi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Peralihan dari penggunaan minyak bumi dan gas sejak abad ke-19 oleh Perusahaan-perusahaan Belanda seperti Royal Dutch Shell, hingga evolusi dalam pemanfaatan batu bara dan gas alam pada masa awal kemerdekaan sampai masa Orde Baru, pembangunan infrastruktur dasar untuk produksi dan distribusi energi mulai berkembang pesat dan menjadi salah satu sumber utama peningkatan ekonomi nasional. Dari situ, terciptalah pondasi untuk pengelolaan sumber daya energi nasional. Semenjak awal kepresidenan Joko Widodo pada tahun 2014, ada beberapa upaya transformasi yang telah menunjukkan kemajuan dalam kebijakan energi Indonesia. Dimulai dari Keputusan besar Joko Widodo untuk mereformasi subsidi bahan bakar pada November 2014, dimana harga bensin bersubsidi Premium (RON 88) dan solar meningkat sebanyak lebih dari 30% (Abdurohman, 2023). Hal tersebut dikarenakan pemerintahan ingin memperbaiki keseimbangan fiskal pemerintah dengan pengurangan subsidi energi yang terlalu banyak (Indonesia's Investments, 2019). Namun efeknya terhadap masyarakat kalangan bawah memang menimbulkan guncangan ekonomi. Selama masa pemerintahan Joko Widodo, upaya diversifikasi energi juga semakin ditekankan. Tercermin dalam pembentukan Kebijakan Energi Nasional (KEN), serta Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). KEN Indonesia merupakan suatu kebijakan yang dirancang oleh Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai landasan pengelolaan energi, dimana memiliki tiga prinsip dasar utama yakni: berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Kebijakan tersebut telah diresmikan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2014. Tujuan utama kebijakan tersebut adalah agar pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dapat ditingkatkan sebanyak 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 dari bauran energi primer nasional (Kementerian ESDM, 2020). Sementara itu, RUEN berfungsi sebagai rincian dari KEN yang memuat rencana pelaksanaan lintas sektor untuk mencapai target yang ditetapkan oleh KEN. Jadi, jika KEN berfungsi sebagai kerangka dasar kebijakan, maka RUEN adalah rencana aksi yang lebih detail dan operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk memenuhi target peningkatan kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Rancangan kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan lebih mempromosikan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti tenaga surya, angin dan bioenergy.

Sebagai upaya untuk memperkuat kebijakan sekaligus pengembangan kualitas infrastruktur pengelolaan energi, Joko Widodo telah melakukan beberapa inisiatif untuk menjalin kemitraan strategis baik dengan negara berkembang maupun negara maju. Dalam menjalankan hubungan bilateral, Indonesia pernah berkolaborasi dengan Jepang pada tahun 2017 dimana pada saat itu keduanya sepakat untuk ingin meningkatkan sistem pembangkit Listrik tenaga panas bumi. Perusahaan yang terlibat pada saat itu adalah Sumitomo Corporation dari Jepang dan PT Supreme Energy dari Indonesia (Indonesia Development, 2018). Tujuan peningkatan tersebut adalah untuk lebih mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Alhasil, proyek tersebut memberikan hasil positif terhadap penggunaan energi di Indonesia dimana pemerintahan berhasil merancang pembangkit Listrik berkapasitas 220 MW

yang berlokasi di Sumatera Selatan. Proyek tersebut telah memberikan pengaruh yang positif dalam mencapai target yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), serta membantu dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia. Dalam strategi multilateral, Indonesia pernah ikut berpartisipasi dalam inisiatif ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2015-2025 (APAEC). Cakupan fokus utama dari target inisiatif tersebut adalah untuk mengembangkan infrastruktur energi, peningkatan efisiensi energi serta mempopulerkan energi alternatif di Asia Tenggara (ANTARA, 2021). sejauh ini, salah satu program unggulan yang dinamakan ASEAN Power Grid telah memberikan peningkatan dalam jaringan transmisi yang lebih kuat, peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi mencapai 32 Gigawatt (GW), serta pemanfaatan jaringan Listrik pintar dalam rangka menunjang kapabilitas pembangkit tenaga surya dan angin dari 5 GW menjadi 28 GW (Safitri et al., 2021). Meskipun begitu, hambatan seperti tren ekonomi, masalah keamanan, serta dampak dari pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi kemajuan implementasi APAEC untuk terus mengejar target yang direncanakan.

### **Trend kebijakan energi internasional yang bilateral**

Pada akhir kepresidenan Joko Widodo, Indonesia bisa diobservasi memiliki trend dalam bentuk kebijakan energi internasionalnya. Trend tersebut adalah kerjasama bilateral dan berhubungan dengan energi terbarukan. Sebuah fokus terhadap energi terbarukan mencerminkan komitmen Indonesia yang berulang kali disampaikan terhadap transisi energi di Indonesia ke energi terbarukan. Komitmen ini misalnya disampaikan oleh Indonesia pada COP 27 bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon dan berkomitmen untuk melaksanakan transisi energi untuk mencapai ekonomi hijau (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi, 2022). Selain itu Indonesia juga sudah memunculkan serangkaian hukum untuk menunjukkan komitmen terhadap transisi energi seperti bentuk paling relevan dan definitifnya yaitu peraturan presiden RI Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Trend bentuk kebijakan energi internasional yang dijalankan oleh Indonesia pada akhir kepemimpinan Joko Widodo bersifat bilateral atau government to government (G2G) dan juga berbentuk MoU.

Kita bisa melihat kebijakan kebijakan MoU bilateral ini dijalankan oleh Indonesia pada tahun 2023-2024 yaitu masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indonesia menjalankan MoU dengan Singapura yang bertujuan untuk menciptakan kerangka institusional yang berhubungan dengan investasi kepada energi hijau, transisi energi, dan jual beli komoditas listrik antar negara. Lalu ada MoU dengan Filipina yang berlatar kebutuhan batu bara di Filipina mengingat bahwa Indonesia melaksanakan pelarangan ekspor batu bara pada Januari 2022. Tetapi selain hal itu, MoU tersebut juga membahas potensi keberuntungan dari energi terbarukan dan transisi energi (Departemen Energi Filipina, 2024). Kita juga bisa melihat contoh outlier yaitu MoU dengan Venezuela yang memiliki tujuan utama ekonomi dalam minyak dan gas. MoU ini fokus terhadap kesempatan investasi dalam gas dan minyak pada Venezuela bagian timur dan barat untuk saling menguntungkan ekonomi kedua negara (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2024). Alasan MoU dengan Venezuela bisa dikatakan sebuah outlier adalah karena fokus utamanya yang merupakan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki hubungan dengan komitmen Indonesia terhadap transisi energi atau energi hijau, tetapi tetap bisa dilihat trend kebijakan energi internasional yang bilateral pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo karena ketiga MoU tersebut terjadi hanya dalam jendela waktu kurang lebih satu tahun.

Indonesia secara historis tidak asing dengan kerjasama energi multilateral seperti ASEAN Power grid atau Asean Plan Of Action For Energy Cooperation (APAEC). Lalu mengapa kita melihat trend terhadap bentuk kerjasama yang bilateral pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Apakah karena ukuran dan waktu kebijakan energi multilateral yang besar dan panjang sehingga tidak semudah kerjasama bilateral? Kita bisa mengeksplorasikan hal ini dengan memandang pemilihan antara kebijakan bilateral dan multilateral sebagai masalah strategis. Banyak akademis yang mengkaji masalah kebijakan internasional multilateral dalam bidang energi dan sebagian besar dari mereka memiliki keterbatasan atau pelaksanaan yang tidak optimal. Misalnya integrasi energi listrik ASEAN sama seperti tujuan ASEAN power grid merupakan sebuah kebijakan yang tidak praktis sebagai target untuk 2025 dan kebijakan yang lebih praktis adalah kontrak bilateral (Burke & Nam, 2021). Masalah kebijakan energi internasional yang multilateral tidak hanya terbatas pada anggota dan wilayah ASEAN saja. Naiknya biaya energi dan harga minyak yang semakin tidak konsisten menciptakan sebuah ombak kerjasama multilateral dalam bidang energi. Tetapi banyak dari mereka memiliki hasil yang kurang dan tidak berhasil dalam menjalankan target mereka karena alasan-alasan seperti negara-negara gagal mempromosikan kepentingan bersama dan energi yang banyak dipandang sebagai masalah keamanan, membuat kerjasama sulit dalam level multilateral (Wilson, 2014). Melihat hal tersebut kita bisa melihat latar strategis dalam pemilihan kerjasama bilateral dibandingkan multilateral dalam bidang energi terutama jika kita melihat kerjasama energi bilateral Indonesia yang sukses. Indonesia dan Denmark memiliki MoU pada tahun 2015 dengan Denmark yang selanjutnya diperbaharui sebagai kerja sama yang lebih konkret dengan dibentuknya Indonesia Denmark Energy Partnership Programme (INDODEPP) pada masa awal pemerintahan periode kedua

Jokowi yaitu 2020 dan efektif sampai 2025. Dengan adanya keberlanjutan kerjasama bilateral antara Denmark dan Indonesia dalam bidang energi melambangkan bahwa kerjasama sebelumnya dinilai efektif, hal ini juga bisa dilihat dengan hasilnya seperti adanya pembangkit listrik angin di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari kerjasama ini untuk pihak Indonesia dan untuk pihak Denmark mereka bisa menjalani kepentingan mereka seperti menjadi role model dan kontribusi terhadap usaha penurunan emisi dunia (Samhati, 2023). Maka dari itu kita bisa melihat bahwa ada sebuah poin strategis dalam trend kerjasama yang bilateral dibandingkan dengan multilateral. Multilateral yang memiliki sejarah kegagalan dan bilateral yang memiliki keberhasilan di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Strategi kebijakan energi yang dilakukan semasa kepemimpinan Joko Widodo memiliki bermacam implikasi terhadap jalannya pengelolaan energi yang terjadi di Indonesia, hal ini bisa terlihat dalam kebijakan energi dalam sektor domestik dimana harga energi jenis BBM yang jauh naik saat Joko Widodo menjabat sebagai presiden Republik Indonesia, di lain sisi yaitu di sektor pengelolaan energi yang menyangkut kebijakan luar negeri Indonesia kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia sendiri lebih banyak dilakukan pada sektor bilateral hal ini banyak dilakukan oleh Indonesia karena adanya faktor penyesuaian MoU yang lebih bisa kustomisasi dengan mudah dan tidak seperti kerjasama multilateral yang terkadang sulit untuk bisa menyimpulkan suatu kepentingan bersama. Selanjutnya kerjasama bilateral juga lebih mudah dalam menjalankan kebijakan karena tidak terikat oleh perbedaan kepentingan antar negara. Dengan adanya hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwasannya kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia membawa

efek efisiensi yang lebih besar dalam hal pengelolaan energi di Indonesia dibandingkan dengan kerjasama multilateral pada umumnya.

Dari kesuksesan-kesuksesan kerjasama bilateral yang telah disebutkan dalam penelitian ini, seperti hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Denmark yang cukup bermanfaat dalam menghasilkan pembangkit listrik angin di Sulawesi Selatan, serta menunjukkan efektivitas pendekatan ini dibandingkan kerjasama multilateral yang sering menghadapi kendala dalam implementasinya. Dan maka dari pada itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi bilateral lebih strategis dan efektif bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Maka dengan demikian, disarankan agar kebijakan energi Indonesia di masa depan harus terus mengedepankan kerjasama bilateral yang konkret dan berfokus pada energi terbarukan, sambil tetap mempertimbangkan peluang kerjasama multilateral yang berpotensi.

## **Referensi**

### **Jurnal Artikel :**

Asghar, Z. (2008, November 30). Energy-GDP Relationship: A Causal Analysis for the Five Countries of South Asia. *Applied Econometrics and International Development*, 8(1).

Davytan, V. S., & Khacikyan, S. (2022, December 26). The U.S. Energy Diplomacy in the Condition of World Energy Markets Transformation (south caucasus vector). *Vectors of Social Sciences*, (4).

Do, T. N., & Burke, P. J. (2023). Is ASEAN ready to move to multilateral cross-border electricity trade? *Asia Pacific Viewpoint*, 64(1).

Rahman, A., Dargusch, P., & Wadley, D. (2021). The political economy of oil supply in Indonesia and the implications for renewable energy development. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 114.

Safitri, M., Rizki, K., & Zulkarnain. (2021, July 20). Kebijakan Keamanan Energi Indonesia dalam Pemenuhan Energi Listrik melalui Kerjasama ASEAN Power Grid. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(2), 15-30.

Samhati, S., Hidayat, A., & Makhroja, M. N. (2023). Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Denmark dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Studi Kasus: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Baru untuk Keberlanjutan Energi di Sulawesi Selatan). *Indonesian Journal of Global Discourse*, 5(1).

Shofiyana, N., Supriyadi, I., & Al Qarni, M. U. (2022, September 2). Transisi Energi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 dan Konflik Militer Rusia-Ukraina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

Shu, Z. (2023, February 15). Remodeling of International Regimes in Neoliberal Institutionalism Perspective: Case Study of the South China Sea Arbitration. *BCP Social Sciences & Humanities*, 21, 667 - 676.

Wilson, J. D. (2014). Multilateral Organisations and the Limits to International Energy Cooperation. *New Political Economy*, 20(1), 85-106.

#### **Artikel Daring :**

Abdurohman. (2023, August 24). The Jakarta Post. A Decade of Jokowi's budgetary and economic policy. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/08/24/a-decade-of-jokowis-budgetary-and-economic-policy.html>

Ahdiat, A. (2023, December 29). Minyak Indonesia Habis 18 Tahun Lagi, Batu Bara Lebih Lama. *Databoks*. Retrieved June 14, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/minyak-indonesia-habis-18-tahun-lagi-batu-bara-lebih-lama>

ANTARA. (2021, Agustus 19). AE06-APAEC 2016-2025 Tahap II dukung pengembangan energi berkelanjutan. AE06-APAEC 2016-2025 Tahap II dukung pengembangan energi berkelanjutan. <https://www.antaraneews.com/berita/2338042/ae06-apaec-2016-2025-tahap-ii-dukung-pengembangan-energi-berkelanjutan>

Indonesia's Investments. (2019, September 11). Indonesia's Fuel Subsidy Issue. Indonesia's Fuel Subsidy Issue: Joko Widodo to Raise Fuel Prices in 2014? <https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/indonesia-s-fuel-subsidy-issue-joko-widodo-to-raise-fuel-prices-in-2014/item2402>

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. (2020, November 26). Pemerintah Mendorong Transisi Energi Melalui Energi Baru Terbarukan dan Efisiensi Energi. ESDM. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-mendorong-transisi-energi-melalui-energi-baru-terbarukan-dan-efisiensi-energi>

Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2023). Indonesia And Singapore Sign Mou On Renewable Energy Cooperation, Reviewing Promising Commercial Projects For Win-Win.Outcomes.<https://maritim.go.id/gallery/indonesia-and-singapore-sign-mou-on-renewable-energy-cooperation-reviewing-promising-commercial-projects-for-win-win-outcomes>

Kementrian Luar Negeri Indonesia. (2024). Indonesia and Venezuela Strengthen Cooperation in the Energy Field.<https://kemlu.go.id/portal/en/read/5707/view/indonesia-and-venezuela-strengthen-cooperation-in-the-energy-field>

Taufani, M. R. I. (2024, April 20). RI Banyak Impor BBM dari Singapura dan Malaysia, Angkanya Besar Lho... CNBC Indonesia. Retrieved June 14, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240420165325-128-531919/ri-banyak-impor-bbm-dari-singap>